DAFTAR PUSTAKA

Astika Julia Syafira, H. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung. 204-210.

Babalola BTA, A. O. (2015). Analysis of Impact of Sectoral Goverment Expenditures on Economic Growth in Nigeria: Bound Test Co-integration Approach. 171-184.

Gararldez G.Korobu, W. P. (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. 795-802.

Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban.* Yogyakarta: POLIBAN PRESS.

Hermawan, I. (2019). *Teknik Menulis Karya Tulis Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi.* Karawang: HIDAYATUL QURAN.

Putri Marina Wonggo, D. A. (2017). Analisis Sistem Penatausahaan Belanja Langsung Di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi). 157-166.

Reza Arfansyah Suneth, H. S. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Tentang Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado. 194-204.

Riyanto, P. A. (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjwaban Keuangan Daerah